

RINGKASAN

Tea Gustianingsih
NIM. 217410102010

**Urgensi Perumusan tentang Tindak Pidana *Prank*
dalam Qanun Jinayat di Provinsi Aceh**

Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M.
Dr. Hamdani, S.H., LL.M.

Prank adalah perbuatan yang berdimensi baru dalam sistem hukum di Indonesia, karena itu belum disebutkan secara eksplisit baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Untuk konteks lokal di Provinsi Aceh, juga belum ada Peraturan Daerah atau Qanun yang mengatur perbuatan *prank* secara spesifik. Hal ini menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus akibat perbuatan *prank* yang merugikan korban atau meresahkan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum di Provinsi Aceh mengenai tindak pidana *prank* dan menganalisis urgensi perumusan tentang tindak pidana *prank* dalam Qanun Jinayat di Provinsi Aceh.

Studi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Adapun pendekatan yang dipilih dalam studi ini adalah pendekatan perundang-undangan, sementara sifat penelitian ini adalah preskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumen dan studi literatur. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, interpretatif, dan preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi hukum terkait tindak pidana *prank* di Provinsi Aceh saat ini belum diatur secara jelas dan lugas di dalam Qanun Jinayat Aceh. Meskipun ada beberapa peraturan yang dapat digunakan yang merujuk pada KUHP, UU ITE, dan alternatif penyelesaian kasus di luar pengadilan, kebutuhan akan regulasi yang lebih spesifik dan terfokus terhadap karakteristik unik tindak pidana *prank* perlu dirumuskan di tingkat lokal di Provinsi Aceh. Urgensi pembentukan Qanun Jinayat khusus tentang tindak pidana *prank* di Provinsi Aceh sebagai upaya meningkatkan landasan hukum yang lebih efektif dalam penanganan kasus-kasus tersebut di tingkat lokal dengan memasukkan unsur keislaman dan nilai-nilai lokal sebagai landasan normatifnya. Keberadaan regulasi ini diharapkan dapat memberikan kerangka kerja yang lebih efektif dan jelas bagi aparat penegak hukum serta melibatkan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kasus-kasus tindakan pidana *prank*.

Pemerintah Aceh sudah saatnya mengembangkan peraturan hukum lokal atau merevisi Qanun Jinayat Aceh dengan menambahkan ketentuan-ketentuan yang secara spesifik mengatur tindak pidana *prank*. Langkah ini harus didukung dengan proses konsultasi publik dengan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara luas.

Kata Kunci: Urgensi, Qanun Jinayat, Tindak Pidana *Prank*, Aceh

SUMMARY

Tea Gustianingsih
NIM. 217410102010

***The Urgency of Formulating Prank Crimes in Qanun
Jinayat in Aceh Province***

Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M.
Dr. Hamdani, S.H., LL.M.

Pranking is an act that has a new dimension in the legal system in Indonesia because it has not been mentioned explicitly in either the Criminal Code (KUHP) or the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE). In the local context of Aceh Province, there is also no Regional Regulation or Qanun that specifically regulates pranks. That becomes an obstacle for law enforcement officials in resolving cases resulting from pranks that harm victims or disturb the public.

This research aims to analyze legal regulations in Aceh Province regarding prank crimes and analyze the urgency of formulating prank crimes in the Qanun Jinayat in Aceh Province.

This study uses a type of normative juridical research. The approach chosen in this study is statutory, while the nature of this research is prescriptive. I used secondary data consisting of primary legal materials, namely related laws and regulations, legal journals, books, and relevant articles. I collected data by document study and literature study techniques. Data was analyzed descriptively, analytically, interpretively, and prescriptively.

The research employs that the existence of legal regulations related to prank crimes in Aceh Province is currently not regulated clearly and straightforwardly in Aceh Qanun Jinayat. Although several regulations can be used that refer to the Criminal Code, the ITE Law, and alternative case resolutions outside of court, the need for regulations that are more specific and focused on the unique characteristics of prank crimes needs to be formulated at the local level in Aceh Province. The urgency of forming a special Qanun Jinayat regarding prank crimes in Aceh Province is an effort to improve a more effective legal basis for handling these cases at the local level by including Islamic elements and local values as the normative basis. It is hoped that the existence of this regulation can provide a more effective for law enforcement officials and involve the public in preventing and handling cases of criminal prank acts.

It is time for the Aceh government to develop local legal regulations or revise the Aceh Qanun Jinayat by adding provisions that specifically regulate criminal acts of pranking. This step must be supported by a public consultation process with stakeholders to ensure that the resulting regulations reflect the aspirations and needs of society at large.

Keywords: Urgency, Qanun Jinayat, Prank Crime, Aceh